

STRATEGI SOSIALISASI POLITIK KEPALA DESA DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS PENGUATAN KEARIFAN LOKAL

Nike Purnamawati¹, Erinda Alfiani Fauzi²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangkaraya

Email : Nike.purnawati@ulm.ac.id

ABSTRACT

In the 2022 Village Head Pilkada, the Mandastana City Village Apparatus did not focus its political outreach efforts on village community voters, even though the number of village community voters reached more than half of the votes. The village apparatus of Mandastana City decided that in the 2022 Pilkada, village community voters would become one of the strategic groups on the political socialization agenda. The large number of village community voters can be an opportunity for the Puntik Dalam Village apparatus to increase the percentage of voter participation in the 2022 Pilkada by conducting political socialization focused on the village community voter segment, with the hope of a large number of voters. Village community voters will encourage a significant increase in the percentage of voter turnout. Puntik Dalam Village, Mandastana Barito Kuala District, which has high cultural values, is actually not difficult to find and identify various local wisdoms that support village communities because many religious leaders and traditional elders can develop local wisdom. like songs, sayings, or even advice attached to everyday life. The village community, which is mostly made up of members of the indigenous Banjar tribe, has developed certain patterns of behavior and a set of core values over time. These patterns of behavior and values represent the local wisdom of the hamlet. Even though many migrants come from Javanese or Bugis tribes, villagers are still able to mingle and compete in a healthy manner in village head elections. Regarding the context of village head elections, because the use of this network media does not target certain groups of voters in particular, everyone can obtain election information and the 2022 Mandastana Regency Pilkada stages by using this network media, and are not constrained by space or time constraints for candidate heads village in carrying out its political winning strategy.

Keywords: political socialization, local wisdom, winning strategy

ABSTRAK

Dalam Pilkada Kepala Desa 2022, Aparatur Desa Kota Mandastana tidak memfokuskan upaya penjangkauan politiknya pada pemilih masyarakat desa, padahal jumlah pemilih masyarakat desa mencapai lebih dari separuh suara. Perangkat desa Kota Mandastana memutuskan bahwa dalam Pilkada 2022, pemilih masyarakat desa akan menjadi salah satu kelompok strategis dalam agenda sosialisasi politik. Banyaknya jumlah pemilih masyarakat desa dapat menjadi peluang bagi aparatur Desa Puntik Dalam untuk meningkatkan persentase partisipasi pemilih dalam Pilkada 2022 dengan melakukan sosialisasi politik yang difokuskan pada segmen pemilih masyarakat desa, dengan harapan jumlah pemilih yang besar. Pemilih masyarakat desa akan mendorong peningkatan persentase partisipasi pemilih yang signifikan. Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana Barito Kuala yang memiliki nilai budaya tinggi sebenarnya tidak sulit menemukan dan mengidentifikasi berbagai kearifan lokal yang mendukung masyarakat desa karena banyak tokoh agama dan tetua adat yang dapat mengembangkan kearifan lokal. seperti lagu, ucapan, atau bahkan nasihat yang melekat pada kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa, yang sebagian besar terdiri dari anggota suku asli Banjar, telah mengembangkan pola perilaku tertentu dan seperangkat nilai inti dari waktu ke waktu. Pola-pola perilaku dan nilai-nilai ini mewakili kearifan lokal dusun. Meskipun banyak pendatang berasal dari suku Jawa atau Bugis, penduduk desa masih mampu berbaur dan bersaing secara sehat dalam pemilihan kepala desa. Terkait konteks pemilihan kepala desa, karena penggunaan media jaringan ini

tidak menasar kelompok pemilih tertentu khususnya, maka setiap orang dapat memperoleh informasi pemilu dan tahapan Pilkada Kabupaten Mandastana 2022 dengan menggunakan media jaringan ini, serta tidak terkendala keterbatasan ruang atau waktu bagi calon kepala desa dalam menjalankan strategi kemenangan politiknya.

Kata kunci: sosialisasi politik, kearifan lokal, strategi kemenangan

PENDAHULUAN

Dari Sabang hingga Merauke, seluruh Indonesia adalah rumah bagi banyak kearifan lokal, yang juga dikenal sebagai "keistimewaan lokal", yang dapat ditemukan di komunitas kecil dan besar. Karena kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan salah satu komponen identitas bangsa, maka sudah menjadi keharusan bagi setiap masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri untuk berupaya melindungi dan menjaganya tetap utuh. Hal ini karena kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan identitas nasional. Pada dasarnya bentuk kearifan lokal di Indonesia bermacam-macam, bentuk-bentuk kearifan lokal yang berkembang di masyarakat, kearifan lokal bisa berupa nilai, aturan atau norma, kepercayaan atau keyakinan dan sebagainya, keragaman bentuk tersebut, kearifan lokal juga memiliki berbagai fungsi, yaitu a) melestarikan sumber daya alam dengan cara konservasi, b) mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, c) mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan atau pengetahuan, dan d) jalan sebagai pedoman, seperti nasihat, keyakinan atau kepercayaan. , pantangan atau tabu, seni dan sastra (Aulia & Dharmawan, 2022).

Kearifan lokal yang berkembang di daerah harus dilestarikan agar pola identitas bangsa tetap hidup dan berkembang, seperti Nyadran pada masyarakat Jawa, Basamsam pada masyarakat Dayak Kalimantan, Binarundak pada masyarakat Sulawesi, Barapen pada masyarakat Papua, Sinamot pada masyarakat masyarakat Sumatera dan Madihin dari Masyarakat Banjar sebagainya. Seiring berjalannya waktu, kearifan lokal ini mulai tergerus oleh zaman, apalagi era disrupsi yang saat ini sedang bergulir, masuknya budaya asing ke Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila mulai berkembang di Indonesia dan diikuti oleh sebagian masyarakat Indonesia, banyak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama atau bersama. Menjaga kearifan lokal ini tetap hidup merupakan perjuangan bagi masyarakat Indonesia, apalagi mengingat fakta bahwa banyak

orang yang sudah menyerah atau tidak peduli untuk mempertahankan kearifan lokalnya sendiri.

Kearifan lokal merupakan benteng untuk mencegah masuknya budaya asing ke Indonesia, namun saat ini masyarakat Indonesia banyak yang meninggalkan kearifan lokal dan terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsanya, selain itu banyak masyarakat yang meninggalkan ajarannya. Para pahlawan untuk menjaga kearifan lokal. Ini berfungsi sebagai dasar bagi kesadaran diri negara Indonesia. Maraknya teknologi atau yang sering dikenal dengan era digital dimana segala informasi dapat diakses dengan cepat melalui internet menjadi kontributor utama terjadinya fenomena tersebut. (Rahardi, 2021). Generasi muda yang dikenal sebagai generasi milenial sangat terpengaruh baik secara positif maupun negatif oleh dinamika zaman yang memiliki efek samping semakin mempermudah dalam mengakses apapun melalui internet. (Siregar, 2022). Generasi muda Indonesia saat ini pada umumnya lebih tertarik pada budaya bangsa lain daripada budaya negara Indonesia itu sendiri, meskipun keyakinan bangsa lain tersebut bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Sekalipun aksi anak muda saat ini dapat memberikan gambaran sekilas tentang masa depan negara Indonesia, namun penting untuk diingat bahwa anak muda saat ini akan menjadi penerus jubah kepemimpinan di Indonesia di tahun-tahun mendatang. Jika generasi muda saat ini telah meninggalkan budaya bangsa Indonesia yang merupakan kearifan lokal, maka dapat dipastikan bahwa masa depan bangsa Indonesia tidak akan menjadi pertanda baik bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Terlepas dari kenyataan bahwa nama tersebut telah ada sejak tahun 1997, konsep disrupsi baru mulai mendapat perhatian luas, terutama di kalangan ekonom. Perusahaan yang lebih kecil telah dapat mulai tumbuh dan berhasil bersaing dengan organisasi yang lebih besar sebagai akibat langsung dari perbaikan dalam berbagai bentuk teknologi, khususnya inovasi digital. Pada awalnya disrupsi menjadi perbincangan hangat para ekonom, karena selalu dikaitkan dengan bisnis dan investasi, namun seiring berjalannya waktu, karena perkembangan teknologi digital mulai merambah ke dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga disrupsi tidak hanya terkait bisnis dan investasi, tetapi juga di bidang sosial, budaya dan juga politik (Handayani, 2020).

Salah satu aspek yang terkena dampak interupsi tersebut adalah proses pemilihan umum. Akibat gangguan tersebut, perangkat digital kini dapat digunakan untuk membantu kelancaran prosesi dan kontestasi pemilihan umum di semua tingkatan, baik tingkat nasional, provinsi, regional, bahkan lokal di desa-desa. Desa pada umumnya memiliki bentuk pemerintahan yang disebut pemerintahan desa dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian pemerintahan desa disebutkan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan daerah rakyat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ada dua komponen pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan desa yang digunakan di Indonesia. Komponen tersebut adalah Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan komponen Badan Permusyawaratan Desa. (BPD).

Kondisi saat ini mengungkapkan bahwa jumlah pemilih yang mengikuti pemilihan umum kepala daerah lebih sedikit dari jumlah pemilih yang mengikuti pemilihan umum. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum harus terus dilakukan. Komunikasi yang dilakukan melalui media massa untuk menggambarkan nilai-nilai atau pesan moral politisi tidak sepenuhnya positif, juga tidak sepenuhnya negatif. Sebaliknya, itu jatuh di antara keduanya. Publik dapat terpapar pada citra diri yang sedang dipupuk oleh para anggota partai politik. Namun, tidak ada jaminan bahwa strategi ini akan menghasilkan hasil terbaik, terutama mengingat besarnya jumlah uang yang dibutuhkan.

Jika komunikasi baik verbal maupun nonverbal ditangani dengan baik, maka proses politik akan berjalan lancar. Citra sebenarnya akan dinilai tidak hanya dari tahap “pendekatan”, tetapi juga dari tahap “proses relasi”, yaitu ketika calon-calon dalam PILKADES yang telah terpilih menjadi Kepala Desa membuktikan apa yang telah dijanjikan dan dicitrakan sebelumnya. .

Fungsi Komunikasi Politik Menurut Mc.Nair dan Hedebro dalam Cangara (2007:40-41), fungsi komunikasi politik antara lain sebagai berikut:

A. Menginformasikan kepada masyarakat umum tentang kegiatan yang dilakukan oleh lembaga politik, baik secara terpisah maupun terkait dengan aspek lain dari pemerintahan dan masyarakat

- B. Terlibat dalam kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, program, dan kebijakan lembaga politik.
- C. Memberikan inspirasi kepada para pemimpin politik, fungsionaris partai, dan pengikut partai
- D. Menjadi forum yang dapat menerima pemikiran dan gagasan orang lain, sehingga pemikiran dan gagasan tersebut dapat menjadi topik perdebatan dan dasar opini publik.
- e. Untuk mencerdaskan masyarakat, perlu diberikan informasi dan sosialisasi tentang proses pemilihan umum dan hak-hak mereka sebagai pemilih.
- F. Menjadi sumber kenikmatan publik dengan bertindak dalam kapasitas sebagai "partai demokrasi" dan menampilkan politisi, artis, dan analis atau pengamat politik.
- G. Meningkatkan integrasi sekaligus memperkuat rasa identitas nasional untuk menghindari perselisihan dan bahaya yang ditimbulkan oleh kegiatan separatis, yang dapat membahayakan kohesi negara secara keseluruhan.
- H. Menciptakan lingkungan perubahan melalui pengubahan struktur kekuasaan melalui diseminasi pengetahuan guna menggalang dukungan publik secara luas untuk mendorong reformasi dan demokrasi
- i. Meningkatkan partisipasi individu dalam proses politik melalui penyebaran berita, pembentukan agenda, dan komentar politik
- J. Berperan sebagai watchdog atau anjing penjaga untuk membantu terwujudnya pemerintahan yang baik yang transparan dan bertanggung jawab.

Demi kelangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi di desa, maka desa harus selalu konsisten melaksanakan dan menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak pilih dan kemampuan mengambil keputusan sesuai dengan kompas moral sendiri dapat disalurkan melalui penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang menjadi wadah kegiatan tersebut. Akibatnya, para kandidat ini perlu melakukan upaya untuk memenangkan hati masyarakat dengan memanfaatkan rencana. Komunikasi dan taktik lainnya bisa digunakan untuk mengeksekusi strategi yang ditujukan untuk merebut hati dan pikiran rakyat guna menguasai Pilkades. Teknologi informasi bahkan sudah merambah hingga ke tingkat desa, di mana digunakan

untuk hal-hal seperti pemilihan umum, yang kini dilakukan dengan sistem elektronik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan gangguan, baik verbal maupun nonverbal. Desa yang menggunakan aspek teknologi dan memadukannya dengan kearifan lokal adalah Desa Puntik Dalam yang merupakan desa pertama di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan yang menggunakan sistem tersebut dan terbukti berhasil melakukan kontestasi pemilihan kepala desa dengan 3 desa calon ketua dengan berbagai latar belakang budaya. dan ideologi.

KAJIAN TEORITIK

Strategi Pemenangan Politik

Kajian tentang bagaimana proses yang terjadi dalam memenangkan perang politik oleh partai politik, atau secara langsung, oleh calon presiden atau calon kepala daerah, yang ingin memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagaimana mestinya. konstituen, adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang strategi politik. .Kekuatan politik yang ada (institusi primordial, baik agama maupun daerah), mesin politik yang ada (organisasi sosial politik/kelompok kepentingan, termasuk partai politik, organisasi pemuda, dan media), dan lain sebagainya semua berdampak pada proses ini. , proses pencitraan, sosialisasi politik, dan kampanye yang dilakukan, yang kesemuanya pada hakekatnya merupakan instrumen dari suksesi upaya yang dilakukan untuk memenangkan pemilu.

Kearifan Lokal

Produk budaya tersebut dikenal dengan “kearifan lokal” Karena diperlukan nilai, norma, dan standar yang dapat dijadikan sebagai model dalam melakukan suatu kegiatan, maka kearifan lokal muncul sebagai produk budaya dan diwariskan secara turun-temurun. Kebijakan yang asli bagi suatu komunitas dapat ditemukan terpelihara dalam sejarah dan tradisinya, serta dalam sistem pendidikan resmi dan informal, ekspresi seni, praktik keagamaan, dan bentuk interpretasi kreatif lainnya. Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah sintesa budaya yang dihasilkan oleh pelaku lokal melalui proses yang iteratif. Sintesis budaya ini dicapai dengan internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya, yang kemudian disosialisasikan dalam bentuk norma dan dijadikan aturan dalam kehidupan masyarakat

sehari-hari. Pemain lokal membangun sintesis budaya ini. Tidak menutup kemungkinan kearifan lokal menjadi kebiasaan

praktik, organisasi, pepatah, dan peribahasa adalah contohnya. Pengetahuan lokal dapat eksis dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk reinvention, yang memerlukan penciptaan kembali institusi kuno yang pernah berfungsi dengan baik dan dalam upaya membangun tradisi, yang memerlukan pembangunan seperangkat institusi dan adat istiadat yang sebelumnya berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sosial. Selain itu, kearifan lokal dapat hadir dalam bentuk upaya membangun tradisi, yang mencakup membangun seperangkat institusi dan adat yang pernah berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sosial. - sistem politik tertentu pada periode tertentu, yang terus-menerus diubah dan diciptakan kembali sesuai dengan tuntutan sosial-politik masyarakat yang terus berubah. Pergeseran ini harus dilaksanakan sendiri oleh masyarakat lokal, dengan partisipasi lembaga pemerintah dan non-pemerintah, dan dengan campuran strategi top-down dan bottom-up yang heterogen.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Pemerintahan Desa

Menurut Sunardjo (2005:197), kepala desa adalah seseorang yang menjadi penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam beberapa aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan umum, seperti pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban. Selain itu, penanggung jawab desa bertugas untuk membentuk pola pikir warga masyarakat tersebut. Hal ini dapat berupa menumbuhkan dan memupuk semangat untuk pembangunan desa, yang harus dijiwai dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

Jika struktur politik di Indonesia dapat tetap stabil, maka pertumbuhan negara akan berjalan lancar. Apalagi saat ini otonomi daerah sedang gencar digalakkan, sebuah peluang emas yang harus disambut baik, sehingga dapat dimaknai dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat sesuai dengan amanat Daerah. Konstitusi.

Setiap negara memiliki jumlah keterlibatan politik yang berbeda-beda, yang berarti tidak semua warga negara berpartisipasi dalam proses pemilu. Namun, keterlibatan politik secara umum dipandang sebagai hak setiap warga negara di negara-negara yang telah membangun demokrasi dan telah mengadopsi sistem pemerintahan yang demokratis. Menurut Surbakti

(1992: 144), pengetahuan politik seseorang tentang hak dan kewajibannya terhadap negara serta keyakinannya terhadap pemerintah menjadi penyebab tinggi rendahnya tingkat keterlibatan politik warga negara. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan, minat, dan sikap politik seseorang terhadap politik bangsanya, termasuk penilaiannya terhadap pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metodologi kualitatif dipilih untuk melakukan penyelidikan ini daripada yang kuantitatif. Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dan menyeluruh serta memperoleh fakta-fakta tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam maka digunakan teknik kualitatif. Keputusan ini dibuat agar dapat mengumpulkan lebih banyak informasi. Sementara penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang digunakan untuk penelitian ini, penelitian kuantitatif juga dilakukan. Peneliti menggunakan fokus penelitian dalam penelitian untuk memastikan bahwa penelitian ini terstruktur dengan baik dan tepat sasaran. Metodologi kualitatif dan deskriptif digunakan dalam studi semacam ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Strategi Aparatur Desa Puntik Dalam dalam mendorong partisipasi pemilih pada Pemilu 2022 untuk jabatan Kepala Desa. Untuk itu, peneliti akan menerapkan teori Strategi Sosialisasi Politik, khususnya berfokus pada taktik sosialisasi tatap muka dan sosialisasi melalui media. Desa Puntik Dalam yang terletak di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala menjadi lokasi penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini. Karena masyarakat baru saja selesai menggelar pemilihan kepala desa yang kedua kalinya. Pemilihan kepala desa pertama akan dilakukan pada tahun 2021; namun, karena petahana meninggal pada April 2022, pemilihan ulang untuk posisi tersebut akan dilakukan pada 22 Oktober 2022. Pada tahun 2021, desa Puntik Dalam terpilih sebagai salah satu desa percontohan, dan mampu untuk secara efektif menerapkan pemungutan suara elektronik dengan menggunakan NIK dan sidik jari dalam pilihannya untuk posisi kepala desa. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak individu yang menggunakan hak pilihnya dan berkontribusi pada pertumbuhan proses demokrasi. Persentase pemilih yang berhak memberikan suara pada tahun 2021 adalah 55%, namun angka tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 75% pada tahun berikutnya. Karena pada tahun 2022 jumlah pelamar jabatan kepala desa lebih banyak dibandingkan

tahun 2021. Penduduk Desa Puntik Dalam, serta Ketua Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam, sekretaris pelaksana, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya, akan berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan pengumpulan data yang berbeda: secara khusus, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan dalam ukuran yang sama. Selain itu, versi pendekatan analisis data deskriptif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman digunakan untuk analisis data. (1992). Metode analisis data ini dapat dipecah menjadi tiga kategori berbeda: mengurangi jumlah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau memverifikasi hasil. Sedangkan keabsahan data yang dipilih untuk uji keabsahan dalam penelitian kualitatif ini ditentukan dengan menilai kredibilitasnya menggunakan berbagai jenis triangulasi data, sedangkan keabsahan data itu sendiri dievaluasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Strategi Dalam Sosialisasi Politik

Salah satu hal penting yang perlu dilakukan oleh Perangkat Desa masyarakat Puntik Dalam agar berhasil melakukan proses sosialisasi politik adalah memanfaatkan strategi yang tepat pada saat pemilihan jabatan Kepala Desa. Dalam pilkada, strategi sosialisasi politik digunakan untuk mencapai cita-cita politik yang mengarah pada perubahan masyarakat yang menuju ke arah yang lebih baik, seperti meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan hak pilihnya dalam pilkada. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pendekatan ini dapat digunakan. Agar Perangkat Desa Puntik Dalam dapat menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemilu dan mendongkrak jumlah pemilih pada Pilkada Desa Puntik Dalam Tahun 2022, maka perlu melakukan berbagai langkah dan membuat berbagai upaya.

Ketika teknik yang tepat digunakan, pada akhirnya akan mengarah pada pengembangan kegiatan yang lebih nyata, khusus, dan dapat dipraktikkan di lapangan. Pencapaian tujuan Schroder adalah tujuan utama dari taktik ini, dan tujuan utamanya adalah melakukannya. (2022: 323). Sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Desa 2019-2024, Perangkat Desa telah menetapkan target persentase partisipasi pemilih sebesar 77,5% untuk 269

wilayah se-Kabupaten Barito Kuala. Target ini akan dilaksanakan serentak pada pelaksanaan serentak Pilkada 2022.

Kinerja Aparatur Desa Kota Mandastana sebagai pelaku utama penyelenggaraan Pilkada dalam mensinergikan seluruh potensi yang ada terkait SDM, dana, dan dukungan stakeholders dalam Pilkada akan berdampak signifikan terhadap seberapa baik tujuan tersebut dapat dicapai.

Keterpaduan dan keserasian dalam menata semua unsur tersebut tertuang dalam strategi sosialisasi politik Perangkat Desa Kota Mandastana yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai kegiatan, guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Desa Puntik tahun 2022.

Di sisi lain, jumlah pemilih masyarakat desa yang besar menimbulkan potensi risiko berupa turunnya proporsi pemilih yang mengikuti Pilkada tahun 2022, apabila banyak pemilih masyarakat desa yang tidak memilih. menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Karena itu, aparat desa Desa Puntik menjalankan rencana sosialisasi politik dalam upaya mendongkrak proporsi pemilih masyarakat desa yang mengikuti Pilkada 2022.

Pemetaan Kelompok Target

Pemilih Masyarakat Desa dengan Kearifan Lokal Aparat Desa Puntik Dalam dalam melaksanakan strategi sosialisasi politik terlebih dahulu menentukan kelompok kegiatan sosialisasi politik yang harus disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran pemilih masyarakat desa, agar informasi kepemiluan dan tahapan pemilu Pilkada Desa Puntik Dalam 2022 dapat lebih mudah diterima dan tepat sasaran. Menurut Scroder, ada empat cara untuk berhubungan dengan kelompok pemilih masyarakat desa: pendekatan formal, pendekatan informal, pendekatan melalui media massa, dan pendekatan melalui media jaringan. (2022: 325).

a. Pendekatan Formal

Pendekatan formal dilakukan terhadap pemilih masyarakat desa di Kotamadya Mandastana, dan tindakan yang terkait dengan kegiatan organisasi masyarakat desa dilakukan sebagai bagian dari strategi ini. Untuk mendapatkan tujuan guna pemetaan secara akurat kelompok pemilih yang dimiliki masyarakat setempat pada Pilkada Kota Mandastana Tahun 2022.

Menyusun program-program yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi politik akan jauh lebih mudah jika pemilih dari komunitas yang sama di suatu desa dikelompokkan menjadi satu. Program yang akan digunakan dalam pemilihan kepala desa ini akan memanfaatkan sistem pemilihan kepala desa secara elektronik yang akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pemilihan kepala desa.

b. Pendekatan informal

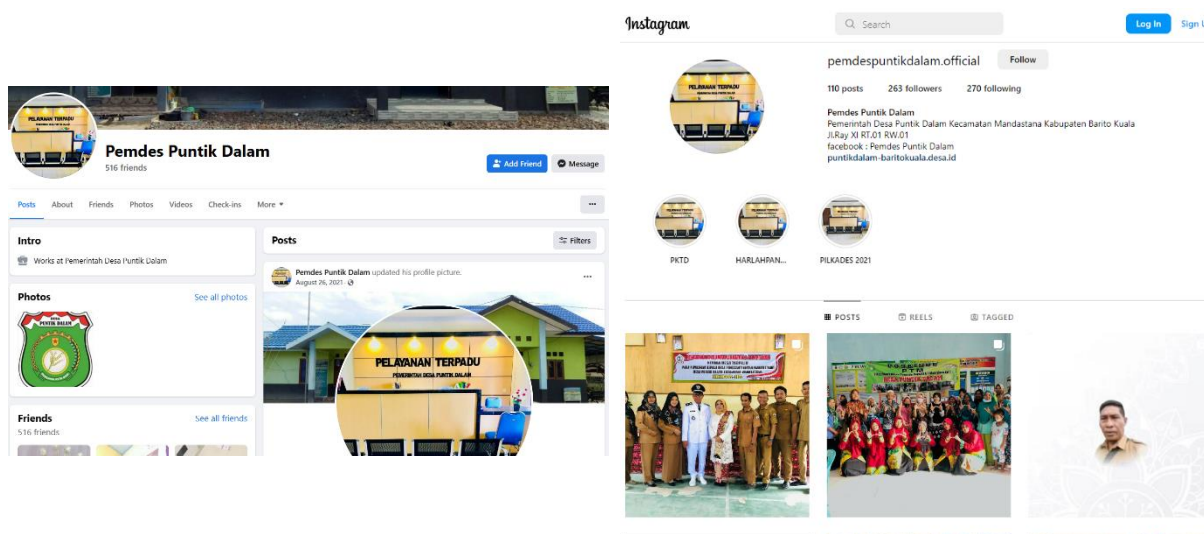
Operasi kehumasan yang menyasar individu pemilih masyarakat desa di Kota Mandastana dilakukan sebagai bagian dari pendekatan informal kepada pemilih masyarakat desa di Kota Mandastana. Oleh karena itu, kelompok sasaran ini terdiri dari pemilih dari masyarakat desa yang bukan anggota kelompok pemuda atau organisasi masyarakat mana pun di desa tersebut. Karena pemerintahan Desa Puntik Dalam membawahi kelompok pemuda yang agak dinamis, tidak mampu menampung pengelompokan pemilih masyarakat desa ini secara eksplisit, agar dalam operasi kehumasan yang dilakukan oleh Perangkat Desa Puntik Dalam atau dengan melibatkan mitra dari Perangkat Desa Puntik Dalam dengan menggunakan materi sosialisasi yang sama untuk pemilih masyarakat desa dapat dilakukan.

c. Pendekatan melalui media massa/ mediasosial

Aparat Desa Kota Mandastana bertanggung jawab melakukan upaya sosialisasi selain pendekatan melalui media sosial kepada pemilih di komunitas desa. Hal ini dimaksudkan agar melalui penggunaan pendekatan kearifan lokal, pendidikan politik akan berlangsung pada saat yasinan, arisan, dan pertemuan masyarakat biasa lainnya. Selain itu, media massa seperti harian lokal Radar Banjar berupaya memaksimalkan penyebaran informasi pemilihan kepala desa dengan sistem terkini yang mengutamakan teknologi informasi dan pengetahuan masyarakat setempat.

d. Pendekatan melalui media jaringan

Pendekatan melalui media jaringan atau internet dilakukan agar menyebarluaskan informasi mengenai pemilihan kepala desa. Ada 3 alternatif pendekatan yakni melalui website resmi www.puntikdalam-baritokuala.desa.id, facebook Pemdes Puntik Dalam serta Instagram @pemdespuntikdalam.official. Pemanfaatan media jaringan berupa website dan media whatsapp warga tersebut dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan dan sekaligus untuk menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat.



Sumber: Jaringan Sosial Media Pemerintah Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Barito Kuala, 2023

Karena penggunaan media jaringan ini tidak menyasar kelompok pemilih tertentu secara khusus, maka setiap orang dapat memperoleh informasi pemilu dan tahapan Pilkada Kabupaten Mandastana 2022 dengan menggunakan media jaringan ini, dan tidak terkendala oleh kendala ruang atau waktu dalam melakukannya.

Penerapan Kearifan Lokal dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa

Diawali dengan pelaksanaan Pilkada 2022 dan berlanjut hingga Pemilu 2024, panitia pemilihan kepala desa Puntik Dalam melakukan gerakan sosialisasi pengawasan secara partisipatif. Gerakan ini berlangsung hingga Pemilihan Umum 2024. Panitia pemilihan kepala desa Desa Puntik Dalam berharap masyarakat Desa Puntik Dalam dapat terlibat aktif sebagai pengawas partisipatif dalam mengawal pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 Sosialisasi diawali dengan pilkada serentak tahun 2022 dengan pengawasan partisipatif yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara berkesinambungan agar

masyarakat dapat memahami sepenuhnya fungsi pengawasan dan dapat melakukan pengawasan aktif sebagai mitra panitia pemilihan kepala desa Desa Puntik Dalam. Pemantauan partisipatif adalah metode lain yang dapat digunakan dalam perjuangan untuk menghindari dan mengurangi jumlah pelanggaran pemilu.

Jika kita terlibat dalam proses mengawasi jalannya pemilu, maka masyarakat tidak boleh memihak yang membantu atau merugikan salah satu peserta pemilu. Selain itu, tidak boleh mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu yang cukup penting. Mereka wajib mengikuti kegiatan yang mendorong terciptanya kondisi yang mendukung terselenggaranya pemilu yang aman, damai, tertib, dan tidak berbelit-belit.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam berkali-kali melakukan pendekatan kepada berbagai masyarakat dan pemangku kepentingan. Beberapa pendekatan yang dilakukan lebih menasar kelompok sasaran berdasarkan pemikiran konvensional di daerah tersebut. Hal ini memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan berada di belakang tindakan yang sedang dilakukan. Supervisi partisipatif adalah metode sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan banyak kalangan seperti forum warga, organisasi kemasyarakatan dan pemuda, organisasi mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok lainnya. Selain mengajak seluruh warga masyarakat, panitia pemilihan kepala desa Desa Puntik Dalam juga melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula dengan mendatangi sekolah menengah dan kejuruan yang ada di Kecamatan Mandastana sekitar Desa Puntik Dalam. Sosialisasi untuk pemilih pemula ini diadakan selama pemilihan. Ingatlah bahwa menjaga hubungan sosial dengan ASN masih menjadi perhatian utama.

Diyakini bahwa ketika pemilu dilaksanakan, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai objek, tetapi juga dapat berfungsi sebagai subjek dengan mengikuti proses pemantauan pemilu secara partisipatif. Ini akan memenuhi keinginan bahwa masyarakat akan dapat beroperasi sebagai subjek. Hasil investigasi panitia pemilihan kepala desa Desa Puntik Dalam menunjukkan bahwa ketidaktahuan akan pentingnya pengawasan partisipatif bagi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang bermartabat merupakan salah satu indikator kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu. Penyebaran pengawasan partisipatif yang selalu diperkuat pada akhirnya mengarah pada peningkatan derajat

keterlibatan masyarakat di Desa Puntik Dalam untuk memberikan informasi awal tentang dugaan pelanggaran pemilu.

Tujuan utamanya adalah agar kearifan lokal ini tetap eksis, yakni dengan terus melakukan kegiatan tersebut secara rutin, baik sebulan sekali atau setahun sekali. Hal ini dimaksudkan agar tingkat keterlibatan masyarakat dalam acara ini cukup tinggi, dan masyarakat selalu diajak untuk membawa keluarga khususnya anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Pembahasan

Kebijakan revitalisasi kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan karakter bangsa dalam kerangka ketahanan nasional, yang dilakukan melalui taktik dan upaya sebagai berikut: agar kearifan lokal berkembang, lestari, dan memperkuat karakter bangsa, diperlukan kebijakan revitalisasi kearifan lokal untuk memperkuat karakter bangsa.

A. Pendekatan legal-formal dilakukan dengan membentuk payung hukum yang kuat, yang dapat dilakukan baik melalui upaya pengaturan khusus berupa Undang-Undang Kebudayaan yang masih dalam proses pengesahan, maupun melalui peraturan perundang-undangan yang ada. UU Kebudayaan masih dalam proses pengesahan.

B. Strategi penguatan dan pendelegasian wewenang dilakukan dengan menetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai leading sector untuk memimpin pelaksanaan program revitalisasi kearifan lokal untuk penguatan karakter bangsa dalam rangka penguatan dan pendelegasian wewenang. Ketahanan Nasional.

C. Strategi penyusunan program revitalisasi meliputi (1) inventarisasi dan pendokumentasian kearifan lokal di seluruh Indonesia, (2) kajian kritis oleh sekelompok ahli untuk menentukan kearifan lokal yang harus dilestarikan atau dilestarikan, dan (3) sosialisasi dan sosialisasi revitalisasi dari kearifan lokal.

D. Strategi sinergi kelembagaan dilaksanakan dengan menjadikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai leading sector yang harus bersinergi dengan instansi lain (pemerintah, swasta maupun asing) dan perorangan yang memiliki komitmen, dukungan dana dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan melakukan revitalisasi kearifan lokal dalam rangka penguatan karakter. bangsa dalam konteks Kerangka Ketahanan Nasional.

e. Pelaksana program revitalisasi kearifan lokal adalah mereka yang menerapkan strategi distribusi dan sosialisasi untuk mendapatkan hasil maksimal dari program dan berbagi dengan masyarakat hasil dari kebangkitan kearifan lokal.

F. Tujuan dari strategi pemanfaatan peran media publik yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan apresiasi dan penerapan kearifan lokal oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan pejabat publik sebagai panutan yang menghargai dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari.

Akibat dari penggunaan metode sosialisasi pemenangan pada kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Puntik Dalam, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Pada tahap awal, perangkat desa dan panitia pemilihan Kepala Desa membentuk tim sukses dengan merekrut tokoh-tokoh yang memiliki kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Ada total tiga orang per wilayah/per RT, dan beberapa contoh dari orang-orang berpengaruh ini antara lain Ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Masyarakat dan penanggung jawab RT. Menyusul pembentukan tim sukses, kepala desa yang baru terpilih, Muhraini, menjalankan organisasi dengan mendelegasikan anggota tim untuk peran seperti tim survei dan tim penggalang massa untuk mengumpulkan suara selama kampanye. Menurut Wahid (2016:155) "Kampanye politik adalah tindakan politik yang diselenggarakan oleh komunikator profesional yang dikenal sebagai tim sukses, konsultan politik/kampanye, manajer kampanye, atau spin doctor." Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan di sini. Hal ini juga sependapat dengan apa yang disebutkan Siagian (dalam Syarifudin 2019: 54) bahwa "perencanaan strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan dilaksanakan oleh semua tingkatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi". organisasi."

Selain itu, Tim Sukses juga bertugas melakukan jajak pendapat kepada masyarakat untuk mengetahui lebih dalam tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait dengan cara kerja pemerintahan Kades sebelumnya. Menurut Firmanzah (dikutip dalam Sulistiowati 2018: 41), "Strategi politik adalah suatu pendekatan komunikasi politik yang dilakukan oleh kontestan atau bakal calon untuk memenangkan pemilu." Hal ini sesuai

dengan apa yang dikatakannya. Calon pelamar atau peserta diminta untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri.

taktik dan teknik khusus apa yang diperlukan untuk setiap pemilih. Akibatnya, dalam proses penetapan tujuan, ketiga calon kepala daerah menciptakan target perolehan suara Pilkada dari keluarga dan dari daerah itu sendiri. Di antara target yang ditentukan, harus ada floating period dan pendukung kontestan.

Akibatnya, ada persyaratan untuk penyelidikan untuk memastikan tingkat bantuan. Selain itu, calon atau kontestan berkewajiban melakukan penelitian untuk menentukan jumlah pendukung, massa mengambang, dan pendukung calon atau kontestan dari calon lain. Identifikasi ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh selama pemilu, serta untuk menentukan taktik pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh masing-masing pemilih dengan kelompok pemungutan suara.

Hal itu dilakukan dengan memasang spanduk dan baliho di kantor kepala desa dan di setiap RT agar masyarakat mengetahui visi dan tujuan calon kepala desa dan dapat menentukan “pilihan” berdasarkan informasi yang diberikan. Pemberian informasi secara menyeluruh kepada masyarakat dilakukan dengan memasang spanduk dan baliho di kantor kepala desa dan di setiap RT.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Jamieson sebelumnya. (dalam Budianto 2018:22) bahwa “Komunikasi politik pada musim kampanye harus memusatkan fokus utamanya pada tujuan utamanya, yaitu memberikan informasi yang komprehensif kepada publik sebanyak mungkin sehingga publik dapat membuat “pilihan” berdasarkan pengetahuan atau informasi yang mereka miliki. disediakan.

Kampanye dilakukan oleh calon sendiri bersama dengan tim sukses, dan terdiri dari mengunjungi rumah-rumah orang yang menjadi sasaran kampanye untuk meyakinkan target bahwa calon harus terpilih sebagai kepala desa.

Bawalah tawaran berupa visi dan tujuan, disamping program kerja yang diantisipasi untuk memungkinkan pemenuhannya yakni kontribusi untuk kebaikan bersama.

Untuk menjaga reputasi positif di masyarakat, posisi kepala desa diputuskan dan diisi jauh sebelum ada proses pencalonan. Hal itu dilakukan dengan melakukan interaksi dan

silaturahmi secara rutin, mendatangi acara-acara yang diadakan di desa, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Perencanaan kampanye yang terorganisir mencerminkan bahwa kampanye politik dilakukan secara profesional, melibatkan banyak pihak, dan didukung oleh berbagai kegiatan yang diharapkan dapat mendekatkan aktor politik dengan pemilih. Pelaksanaan kampanye yang terorganisir dapat diidentikkan dengan manajemen kampanye yang baik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Wahid (2016:108) bahwa manajemen kampanye merupakan proses yang tidak terpisahkan dalam proses kampanye. Artinya, kampanye dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, pihak-pihak yang terlibat, pesan dan media yang dibutuhkan, khalayak yang direncanakan dan kebutuhan khalayak.

KESIMPULAN

Strategi yang dilakukan Calon Kepala Desa untuk memenangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 adalah dengan strategi sosialisasi kemenangan secara intensif. Strategi tersebut dilakukan dengan baik mulai dari pembentukan tim sukses, pengorganisasian, penetapan target, pemasangan spanduk dan baliho, Mengunjungi rumah warga sasaran, Membawa penawaran berupa visi dan misi beserta program kerja, memberikan citra yang baik kepada masyarakat. Selain itu, perangkat desa dan panitia pemilihan Kepala Desa menggunakan empat pendekatan untuk menentukan kelompok sasaran pemilih masyarakat desa Puntik Dalam pada Pilkada Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022. Melalui pendekatan formal, dapat ditentukan kelompok sasaran pemilih masyarakat desa Puntik Dalam, yaitu pemilih warga masyarakat desa Puntik Dalam. Organisasi masyarakat desa Puntik Dalam yang terdaftar di desa-desa yang tersebar di Kecamatan Mandastana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar Ilmu-Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Darmadi, Hamid. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Teori Konsep Dasar dan Implementasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Fasya, T. K. (2020). Budaya Lokal di Era Disrupsi dan Ketahanan Nasional : Sebuah Tantangan Bagi Antropologi Pendidikan. Seminar Nasional “Budaya Lokal Di Era Revolusi Industri 4.0, 1, 31–40.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Gading Inti Prima Rosidi Rush dan Althoff, 1997, *Pengantar Sosial Politik*. Raja Grafindo, Jakarta
- Habibah, S. M., Setyowati, R. R. N., Surabaya, U. N., & Kulon, L. (2022).
- Haryono, D. Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. *Jurnal Administrative Reform* Vol 6, No 2, 2018.
- Hasan, Erlina. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Jatinangor: Refika Aditama
- Magelang, K. K. (2016). *Perjalanan Mewujudkan Pilkada Kota Magelang Tahun 2015 yang Bermartabat*. Magelang: KPU Kota Magelang.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maridi, M. (2015). Mengangkat budaya dan kearifan lokal dalam sistem konservasi Tanah dan Air. *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning*, 12(1), 20–39.
- Marpaung, L. A. (2013). Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2).
- Martawijaya, M. A. (2016). *Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal*. Masagena.
- Mas`oed, M., & MacAndrews, C. (2011). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moderasi Beragama dalam Upaya Internalisasi Nilai Toleransi Pada Generasi Z. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 126–135.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.70>
- Moertopo, A. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS, 1974.
- Moleong, Lexi J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualittif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen* . Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- Muthahhari, M. R. (2020). Jaringan Komunikasi Politik yang Dipilih Kepala Daerah dalam Proses Perumusan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2019. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1).
- Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.6576>
- Nawawi, H. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Nimmo, Dan 2006, *Komunikasi Politik; Komunikator, pesan dan Media*;Bandung PT remaja Rosdhakarya.
- Nurhaeni, I. D. (2009). *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: UNS Press.
- Parwanto, D. 2014. *Pemilu Sehat Cermin Kedewasaan Berdemokrasi*. Diakses April 16, 2023. Dari <http://www.pusakaindonesia.org/pemilu-sehat-cermin-kedewasaan-berdemokrasi/>

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.
- Peraturan Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara Prihatmoko, J. J. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP21, 2003.
- Raden, Sahran dkk. 2019. *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 Di Sulawesi Tengah*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Radmilla, Samita, 2011. Kearifan lokal : Benteng Kerukunan, Jakarta :
- Soemanto, W. Psikologi Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipita, 2006.
- Sorensen, George. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keduabelas. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunardjo, Unang. 2005. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
- Zed, M. (2004). Metode peneletian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.